

## **Kompetensi *Digital Leadership* Terhadap Adopsi Teknologi Digital di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat**

**Suriyatul Maula**

Universitas Teuku Umar  
*e-mail: Suriyatulm04@gmail.com*

**Munawarah**

Universitas Teuku Umar  
*e-mail: Munawarahsma75@gmail.com*

**Nurasma Aripin**

Universitas Teuku Umar  
*e-mail: nurasmaaripin@utu.ac.id*

### **Abstract**

*Digitalisasi dalam pemerintahan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik. BPBD Aceh Barat, sebagai lembaga yang berperan penting dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, dalam mengadopsi teknologi digital dibutuhkan kompetensi digital leadership oleh para pimpinan di instansi tersebut agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kompetensi digital leadership pemimpin BPBD Aceh Barat dalam mengarahkan adopsi teknologi digital guna mendukung respons cepat dan mitigasi bencana di wilayah Aceh Barat. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang ditentukan berdasarkan purpose sampling yaitu pengetahuan para informan dengan objek penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi keterampilan digital yang diperlukan, seperti literasi digital, visi digital, komunikasi, serta adaptabilitas terhadap teknologi oleh para pemimpin. Fokus penelitian ini pada organisasi BPBD Aceh Barat, secara khusus mengkaji Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, sebagai kapala bidang yang secara teknis banyak berinteraksi dengan teknologi terkait penanggulangan bencana di Aceh Barat. Terdapat empat adopsi teknologi digital di BPBD Aceh Barat yaitu Sensorsirene Peringatan Dini, Seismometer, Akun Media Sosial, SIMAMPU yang membutuhkan kompetensi digital leadership para pemimpin atau kepala bidang yang menganinya..*

**Keywords:** *Digital Leadership; Adposi Teknologi; BPBD*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif (Cahyarini, 2021). Sejalan dengan tantangan ini diperlukannya reformasi dalam pemerintahan dengan mengadopsi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga telah dipaparkan dalam program pemerintah pada awal pemerintahan Jokowi, beliau telah mengusung perlunya digitalisasi dalam penyelenggaarn pemerintahan khususnya dalam pemberian pelayanan publik.

Komitmen untuk mendigitalisasikan proses penyelenggaraan pemerintah ini salah satuna dapat dilihat pada instruksi Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE ini merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintaan.

Menteri komunikasi dan informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan pada saat ini hasil indeks masyarakat digital indonesia (IMDI) 2024 mencapai skor 43,34, indeks ini ini naik 0,16 dari IMDI tahun 2023. Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya tingkat melek digital di Indonesia sudah semakin meningkat. Dengan peningkatan penggunaan teknologi digital ini memang akan membantu pemerintah dalam mengadopsi teknologi. Dengan didukung dengan sumber daya manusia yang sudah mulain paham akan penggunaan teknologi. Namun, adopsi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan.

Penyelesaian masalah yang muncul dalam adopsi teknologi digital pemimpin diharapkan dapat menjadi role model bagi bawahannya untuk bisa menyelesaikan masalah dan melakukan perubahan. Tanpa pemimpin yang mampu mengarahkan, organisasi akan kehilangan kendali, karena bawahan cenderung hanya bergerak jika pemimpinnya bergerak. Dalam era perubahan yang cepat, pemimpin yang mampu beradaptasi sangat dibutuhkan. Kepemimpinan perubahan melibatkan kemampuan pemimpin untuk menginisiasi, memobilisasi, dan memfasilitasi transformasi dalam organisasi, dengan tujuan meningkatkan pencapaian organisasi secara keseluruhan (Sufyanah, 2023)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga pemerintahan non departemen yang melaksanakan tugas tugas dibidang penanggulangan kebencanaan. Di kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan koordinasi nasional penanggulangan bencana (BNBP). Adopsi teknologi digital di BPBD memiliki peran krusial, terutama dalam mitigasi, respons, dan pemulihan pasca-bencana. Salah satu teknologi yang telah dilakukan oleh BPBD dinamakan Early Warning Sistem (EWS) yang telah banyak juga dilakukan sebagai upaya dasar dalam menanggulangi bencana terlebih untuk mereduksi korban jiwa yang dimungkinkan terjadi pada daerah rawan bencana. EWS ini adalah sistem dalam bentuk software yang diintegrasikan ke internet (Aziz, 2024). Selain dari EWS BPBD juga memiliki beberapa alat atau teknologi digital lainnya.

Aceh Barat merupakan daerah rawan bencana. Bencana tersebut diantaranya banjir, kebakaran, dan puting beliung. Dampak yang ditimbulkan bencana ini setiap tahun adalah kerugian masyarakat baik dari segi materi maupun psikologi. Berdasarkan data dari website BPBD Aceh Barat, banjir telah merusak 80 unit rumah dengan kondisi 14 unit kategori rusak sedang, 26 unit rusak ringan dan sebanyak 38 unit ikut terdampak, bencana banjir juga menyebabkan 1.641 jiwa atau 437 kepala keluarga terdampak rendaman banjir di tahun 2020. Sedangkan bencana kebakaran pada Juli 2020 menghanguskan 7 ruko di Jl. Blangpulo I, berdekatan dengan lokasi pasar tradisional dengan kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 300 juta rupiah.

Kemudian kebakaran juga terjadi di Kecamatan Meureubo pada bulan Maret yang membakar lahan, terjadi di dua titik dengan luas sebesar 1,9 Ha dan 1,5 Ha. Pada bulan Juni juga terdapat kebakaran lahan seluas 2,4 Ha dengan ketebalan gambut lebih dari 1 meter. Adapun bencana puting beliung terjadi pada tahun 2019 di Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, dampak material yang diakibatkan adalah 46 unit rumah dengan keadaan 16 unit rusak berat, 30 unit rusak ringan, sedangkan korban yang terdampak berjumlah 46 kepala keluarga dengan jumlah 157 jiwa (Rahmah & Ikhsan, 2022).

Merujuk pada permasalahan yang sering terjadi di Aceh Barat BPBD Aceh Barat sebagai instansi pelayanan penanggulangan bencana perlu melakukan adopsi

teknologi digital dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam menghadapi kompleksitas bencana yang semakin meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan solusi inovatif, adopsi teknologi digital ini menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Teknologi digital ini bisa meningkatkan efektivitas Penanggulangan bencana dengan cara mempercepat dan akurasi informasi, serta meningkatkan efisiensi operasional pemberian pelayanan public oleh BPBD kepada masyarakat (Irawan et al., 2024).

Dalam adopsi teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintah sangat memerlukan sumber daya manusia yang peka terhadap teknologi teknologi terbaru. Sumber daya manusia (SDM) adalah pendorong utama dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, hal ini harus didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan inovatif yang akan berdampak langsung pada pengembangan kompetensi yang bersinambungan.

Pengembangan kompetensi SDM dalam bidang ini dihadapi dengan berbagai tantangan baru serta kebutuhan keterampilan dan pengetahuan yang baru juga, untuk itulah diperlukan kemampuan yang adaptif dalam transformasi digital pemerintahan (Maritha, 2022). Adopsi teknologi digital yang dilakukan pemerintahan ini pada dasarnya akan dilakukan dengan cara perubahan budaya pada setiap organisasi pemerintahan, dan dalam proses ini diperlukan adanya sosok pemimpin yang adaptif terhadap perubahan khususnya.

Adopsi teknologi di pemerintahan yang dilakukan adalah Langkah krusial yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan public, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsive (Cahyono et al., 2023). Namun, dalam proses transformasi digital ini merupakan proses yang tidak mudah, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh karena itu pemerintah memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak karena ancaman yang juga ditimbulkan oleh teknologi digital. Beberapa tantangan yang ditimbulkan seperti keamanan data dan privasi, anggaran, dan juga sumber daya manusia yang belum melek terhadap teknologi. Sehingga, pemerintah harus mampu berkomitmen untuk melindungi data sensitif masyarakat, serta menjaga keamanan sistem informasi bagi masyarakat, dan mampu meningkatkan kualitas SDM di sebuah organisasi.

Digital leadership merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan organisasi atau bawahan yang dipimpinnya untuk mengadopsi teknologi digital hal ini mencakup pengelolaan, pemanfaatan, dan mengintegrasikan teknologi digital dalam melaksanakan kinerjanya guna mencapai tujuan strategis. Peran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan digital sangat krusial dalam menciptakan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi teknologi (Melliasari et al., 2024).

Dalam penelitian (Jennifer Wesly, 2021) menunjukkan bahwasanya kompetensi kepemimpinan digital memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen keberlanjutan perusahaan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi digital leadership dalam adopsi teknologi digital dalam instansi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan responsif..

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara kompetensi digital leadership dan adopsi teknologi digital di BPBD Aceh Barat. Hasil penelitian digambarkan secara deskriptif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam pengumpulan data. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, penggunaan teknik ini dipilih karena relevan dengan penelitian ini serta memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang valid.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Koordinator Pusdalop PB Aceh Barat, dan dua orang anggota Pusdalop PB Aceh Barat. Informan ditentukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Sugiyono menjelaskan teknik

proposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memilih subjek yang memiliki karakteristik yang relevan dalam penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan menginterpretasikan data yang diperoleh melalui literature review kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran yang dapat mengungkapkan jawaban atas pertanyaan peran kepemimpinan digital dalam transformasi digital pada sektor publik.

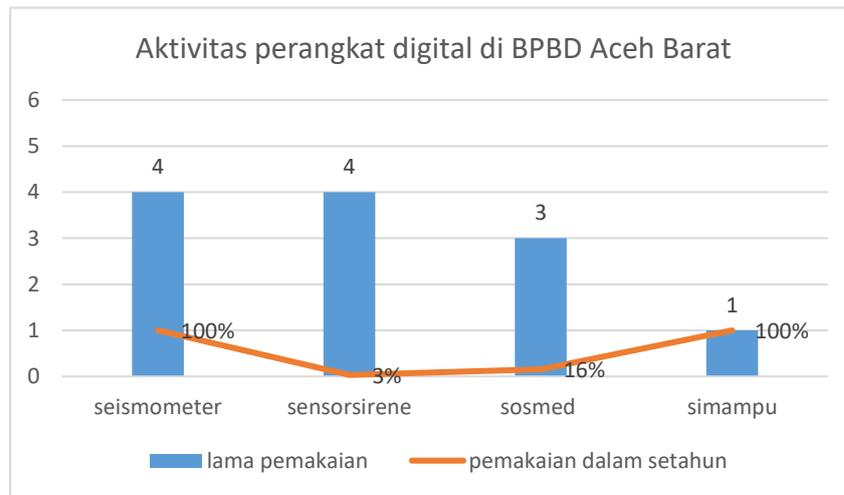
### **C. Hasil Penelitian**

Aceh Barat yang merupakan salah satu daerah rawan bencana, untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Aceh Barat perlu melakukan adopsi teknologi digital. Penggunaan teknologi digital ini dilakukann untuk menghadai kompleksitas bencana yang terus meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan solusi inovatif, adopsi teknologi digital ini menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Teknologi digital ini bisa meningkatkan efektivitas Penanggulangan bencana dengan cara mempercepat dan akurasi informasi, serta meningkatkan efisiensi operasional pemberian pelayanan public oleh BPBD kepada masyarakat (Irawan et al., 2024). Dalam hal ini berikut beberapa teknologi digital yang digunakan di BPBD Aceh Barat:

1. Sensorsirene peringatan dini : sistem ini menggunakan sensor, data satelit, dan perangkat lunak untuk mendeteksi tanda tanda awal tsunami.
2. Seismometer (sensor gempa) : alat yang sesintif yang dirancang untuk mendeteksi dan merekam getaran tanah yang disebabkan oleh gempa bumi, sensor yang dipakai oleh BPBD Aceh Barat saat ini sudah bisa langsung mengetahui titik koordinat terjadinya gempa bumi, serta mendeteksi besar kecilnya gempa yang terjadi.
3. Akun media sosial : Pengelolaan akun media sosial BPBD Aceh Barat sudah mulai diaktifkan untuk memberikan informasi tentang kondisi bencana yang terjadi.
4. SIMAMPU : sistem informasi dan komunikasi yang digunakan oleh BPBD yang langsung terkoordinasi oleh BNPB. Sistem TIK ini juga menjadi tempat

pelaporan kegiatan BPBD, selain itu sistem ini juga terkoneksi dari akun akun media sosialnya BPBD Aceh Barat seperti facebook, Instagram dan lainnya.

Kinerja dari semua adopsi digital yang ada di BPBD tentunya tidak sama, menyesuaikan dengan fungsi dalam penanggulangan bencana. Seperti ada yang digunakan sebagai tahapan kesiap-siagaan, ada yang hanya berfungsi pada saat bencana terjadi dan ada yang di gunakan dari pra, saat dan setelah bencana. Di bawah ini ditunjukkan grafik aktivitas penggunaan teknologi digital di BPBD Aceh Barat dalam rentang waktu setahun



Gambar. 1 Aktivitas Perangkat Digital di BPBD Aceh Barat

Grafik diatas menunjukkan pola penggunaan teknologi digital di BPBD. Penggunaan seismometer berperan krusial dalam mendeteksi pergerakan tanah dan telah dipakai semenjak 2020 di grafik ditunjukkan dengan angka 4 tahun. Sedangkan sensorsirene yang juga telah dipakai dari tahun 2020 (4 tahun) aktif di uji setiap tanggal 24 dan tentunya saat adanya tanda tanda tsunami yang terdeteksi alat ini akan digunakan seperti semestinya. Selanjutnya aktivitas media social BPBD, tercatat 57 postingan pada tahun 2024 khususnya ada 14 postingan Facebook dan 43 postingan Instagram. Namun, sosial media BPBD ini tetap dipantau setiap harinya oleh BPBD, hal ini menunjukkan upaya aktif BPBD dalam menyebarluaskan informasi. Dan terakhir ada Sistem informasi SIMAMPU, yang mulai beroperasi pada tahun 2023, digunakan secara harian untuk mengelola laporan masyarakat dan menghasilkan laporan internal yang harus dipantau setiap harinya.

Adopsi teknologi digital yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, tentu saja BPBD memerlukan seorang pemimpin yang memiliki kompetensi digital leadership. Kepemimpinan digital ini diperlukan untuk mengarahkan, mengelola, dan memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara efektif. Digital leadership diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Keterampilan digital leadership ini merupakan konsep dimana pemimpin mampu mengintegrasikan pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital untuk memimpin dan mengelola organisasi. Menurut Kevin O'Leary dari Digital Workplace Group dalam (Cahyarini, 2021) digital leadership memerlukan 8 keterampilan berikut :

1. *Digital literacy*: seorang pemimpin perlu memiliki keterampilan dasar menggunakan teknologi informasi dan media digital.
2. *Digital vision*: pemimpin harus dapat memprediksi dan meyakinkan orang lain akan peluang jangka Panjang dari teknologi baru dan menyiapkan strategi digital
3. *Defense*: pemimpin harus bisa menetapkan batasan dan kebutuhan organisasi terkait teknologi untuk membangun sistem yang mendukung visi digital.
4. *Presence*: kehadiran pemimpin di lingkungan kerja memberikan pengaruh langsung terhadap keterlibatan tim. Pemimpin yang tampak aktif terlibat dalam upaya digital akan lebih mungkin diikuti oleh anggota tim.
5. *Communication*: Cara pemimpin menyampaikan pesan memainkan peran penting dalam memastikan visi digital diterima dan dipahami.
6. *Adaptability*: Kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan toleransi terhadap inovasi adalah tantangan utama bagi pemimpin. Ini memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan tanggap terhadap perkembangan digital.
7. *Self-awareness*: Pendekatan pemimpin dan proses mempengaruhi orang lain harus berlangsung secara alami dan berkelanjutan.
8. *Cultural awareness*: Para pemimpin harus memahami dan mengingatkan akan perbedaan budaya yang mungkin timbul akibat transformasi digital yang terjadi.

Seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, untuk itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menguasai

teknologi digital. Menurut Kiyak & Bozkurt (2020) Kepemimpinan digital adalah kemampuan penggunaan aset digital organisasi untuk mencapai tujuan bisnis baik di tingkat organisasi maupun individu (Melliasari et al., 2024). Pemahaman seorang pemimpin terhadap penguasaan alat-alat digital sangat mempengaruhi transformasi digital bagi karyawan dalam kinerja suatu organisasi (Cahyarini, 2021).

Dalam instansi BPBD Aceh Barat, kemampuan digital leadership harus dimiliki mulai dari kepala BPBD sampai semua kepala bidang utamanya yang membidangi penanggulangan bencana. Pada penelitian ini kompetensi digital lebih mengkaji secara dalam kompetensi digital Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Bencana (PUSDALOP PB) dikarenakan bidang ini yang banyak berhubungan dengan alat-alat kebencanaan yang sudah mengarah pada digitalisasi.

Berdasarkan peraturan kepala badan nasional Penanggulangan bencana NO 15 Tahun 2012 PUSDALOP PB merupakan satuan tugas yang memiliki fungsi sebagai penerima, pengolah, pendistribusian informasi kebencanaan, dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat. PUSDALOP PB juga berfungsi fasilitator sumber daya sebagai tanggap darurat bencana, serta menjadi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penanggulangan bencana. Sebagai pusat pengendali operasi bencana, PUSDALOP PB memerlukan seorang koordinator yang tidak hanya mampu memaami sistem dan prosedur kerja, tetapi juga memiliki kemampuan teknis yang memadai kemampuan mengoperasikan berbagai alat digital menjadi sangat penting bagi koordinator PUSDALOP PB dalam menjalankan fungsi PUSDALOP PB.

Pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Koordinator PUSDALOP PB memiliki kompetensi terhadap peralatan-peralatan digital di BPBD. Beliau mampu memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan media digital untuk mendukung tugas-tugas di BPBD, seperti mengakses data, berkomunikasi dengan alat-alat digital (handphone, Handy Talkie, dan lainnya), dan mengelola informasi.

Seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dimana semakin maju suatu peradaban maka semakin maju teknologi yang digunakan. Saat ini, pemimpin sebuah instansi secara langsung dan tidak langsung

diwajibkan untuk mempunyai kemampuan dalam menguasai alat alat digital. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menguasai teknologi. Apalagi di era revolusi industri 4.0 akan mempengaruhi pola kepemimpinan yang dibutuhkan. Kemajuan teknologi dalam revolusi industri telah mengubah cara kerja yang berbasis kertas, berubah menjadi berbasis digital. Pemahaman seorang pemimpin terhadap penguasaan alat-alat digitalisasi sangat mempengaruhi transformasi digital bagi karyawan dalam suatu organisasi kerja (Ananda Roro Wulandari et al., 2023).

BPBD Aceh Barat sekarang telah menggunakan bantuan teknologi informasi seperti SIMAMPU. SIMAMPU adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun untuk manajemen dokumen-dokumen pada satuan kerja. SIMAMPU juga digunakan sebagai media untuk penyimpanan seluruh arsip. Sebagai media untuk mempermudah dan mempercepat penyampain informasi tentunya Koordinator Pusdalop PB BPBD Aceh Barat harus bisa memahami dan bisa membantu bawahannya untuk bisa menggunakan sistem aplikasi ini. Koordinator Pusdalop PB juga terus memberikan arahan dan memotivasi anggotanya untuk terus belajar dan menguasai alat alat digital yang dipakai di BPBD (wawancara, 18 oktober 2024).

SIMAMPU yang merupakan sistem yang saat ini dipakai BPBD Aceh Barat juga berfungsi sebagai pusat penginputan data atau pengolahan data terkait bencana yang terjadi di Aceh Barat sehingga menjadi sebuah laporan yang nantinya laporan ini akan diajukan kepada BNPB melalui SIMAMPU. Akurasi data yang diinput ke SIMAMPU sangatlah penting. Oleh karena itu, PUSDALOP PB harus memiliki SDM yang memiliki literasi digital yang mumpuni. Sebagai kepala coordinator PUSDALOP PB berperan penting dalam memberikan pelatihan kepada anggotanya untuk bisa mengoperasikan sistem ini dengan baik, saat ini BPBD Aceh Barat telah memiliki 4 admin yang terlatih untuk mengelola SIMAMPU

Kepemimpinan yang baik itu mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam di dalam organisasi. Selain itu, kepemimpinan yang baik juga ketika pemimpin mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu (Julianto & Agnanditiya Carnarez, 2021). Sementara itu, adopsi teknologi digital tentunya memerlukan seorang pemimpin yang memahami tentang teknologi yang digunakan dalam organisasinya (Wesly et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan pegawai BPBD Aceh Barat menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi Kepala Pusdalob sangat baik, sebagaimana dinilai oleh anggotam timnya. Kemampuan beliau dalam memberikan motivasi dan menyampaikan informasi kepada anggota telah menciptakan suasa kerja yang positif dan produktif. Komunikasi baik ini dapat dilihat dari bagaimana koordinator memberikan motivasi pada anggotanya serta juga bisa dilihat dari cara penyampaian informasi yang disampaikan dapat tersalur secara cepat kepada anggotanya. Kepala koordinasi Pusdalop PB BPBD juga terus terbuka terhadap ide ide baru dari bawahnya. Misalnya dalam rapat yang dilakukan atau dalam situasi darurat beliau akan berusaha mendengar pendapat bawahnya asalkan saran yang beliau dapati dan situasi penyampaian saran ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut ikut serta dalam membantu BPBD Aceh Barat untuk mengadopsi teknologi digital. BNPB kerap melakukan pelatihan 3 bulan sekali, pelatihan ini mencakup penggunaan alat alat teknologi dalam melaksanakan tugas tugas BPBD. Dalam hal ini seorang pemimpin digital harus bisa menjadi penghubung utama antara pihak BNPB dengan BPBD, pemimpin digital juga harus bisa menyampaikan secara jelas kebutuhan spesifik terkait teknologi yang diperlukan atau menyampaikan kendala dari alat alat teknologi digital yang digunakan, serta melakukan evaluasi anggotanya terkait pelaksanaan proyek khususnya proses adopsi teknologi digital.

Kolaborasi BPBD Aceh Barat tidak hanya dengan BNPB tetapi juga mengikat kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kolaborasi yang dilakukan dengan BMKG bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BPBD Aceh Barat. Kerja sama dengan BMKG ini meliputi tentang penggunaan alat alat seperti sensor gempa, tsunami, dan lainnya. Kemampuan networking Kepala Pusdalob yang cukup luas, dapat memudahkan proses adopsi teknologi yang terus terjadi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam kerjasama antara BPBD Aceh Barat dengan. BMKG Badan Pusat Klimatologi (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) dan berbagai organisasi lainnya. Hubungan relasi yang baik ini tak luput dari bagaimana Koordinator Pusdalop PB menjaga hubungan

antar organisasi. Kerjasama ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya serta kualitas kinerja BPBD Aceh Barat.

BPBD Aceh Barat juga turut melatih masyarakat lokal untuk bisa menjadi pribadi yang tanggap bencana. Munculnya berbagai kelompok seperti masyarakat tanggap api di Gampong Lapang, pelatihan dan kerjasama dengan UKM Penanggulangan Kebencanaan UTU, serta berbagai kerjasama lainnya yang telah dilakukan BPBD yang tentunya dibawah pengawasan Koordinator PB BPBD Aceh Barat. Pelatihan ini dilakukan untuk bisa membantu kinerja BPBD dan menciptakan masyarakat yang tanggap akan bencana. Pelatihan yang dilakukan oleh BPBD ini mencakup bagaimana cara menanggapi bencana, dan bagaimana cara pelaporan bisa dilakukan secara cepat menggunakan teknologi digital seperti HP.

Upaya BPBD Aceh barat telah terlaksana, namun terdapat keluhan terhadap pelatihan teknologi yang dilaksanakan oleh BNPB dimana BPBD Aceh Barat harus mengirimkan beberapa anggotanya untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan. Keluhan tersebut muncul dari SDM yang ada di BPBD sendiri dimana mereka menginginkan bahwa pelatihan yang dilakukan ini bisa diikuti oleh semua pihak. Maksudnya adalah mereka mengeluhkan bahwa setiap ada pelatihan yang dilakukan diharapkan bukan hanya satu orang yang dikirim dan selalu orang yang sama. Namun, bukan berarti selama ini ilmu dari pelatihan yang dilakukan tidak tersampaikan kepada karyawan yang tidak mengikuti pelatihan, karena nantinya terdapat juga pelatihan di BPBD dari karyawan yang mengikuti pelatihan Bersama BNPB. Oleh karena itu, anggota berharap bahwasanya untuk pelatihan yang mendatang akan ada kandidat lainnya yang akan mengikuti pelatihan bersama BPBD daerah lainnya di BNPB.

BPBD Aceh Barat telah mengadopsi teknologi digital yang cukup canggih, namun proses penanggulangan bencana tidak meninggalkan adat lama dimana kearifan lokal masih digunakan sampai saat ini. Namun, penggunaan sistem tradisional dalam penanggulangan bencana harus tetap dalam pantauan BPBD, biasanya tim Pusdalop turun ke lapangan untuk membuktikan kebenaran. Terdapat berbagai macam pelaporan yang disediakan oleh BPBD yang dibantu oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi seperti pelaporan melalui nomor 177, dan juga bisa melalui media sosial resmi BPBD Aceh Barat. Penggunaan sistem kearifan

lokal ini tentunya, dilakukan untuk bisa membantu kinerja BPBD, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi bencana. Kearifan lokal yang masih diikutsertakan pada sistem kinerja BPBD Aceh Barat menunjukkan bahwa dalam proses adopsi teknologi digital pemimpin tidak hanya sekedar mengganti sistem lama dengan yang baru tetapi mempertimbangkan hal yang dipercayai masyarakat sejak lama. Seperti itulah layaknya seorang pemimpin yang bijak, akan selalu berusaha melibatkan dan memahami berbagai sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mendukung kinerja organisasinya.

Implementasi *digital leadership* sangat penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi, terutama dalam bidang yang kompleks. Pemimpin digital harus mampu menggunakan teknologi dan mengimbangi perkembangan teknologi, mengatasi berbagai hambatan, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasinya (Cahyarini, 2021). Praktik yang telah dilakukan oleh Koordinator Pusdalop PB BPBD Aceh Barat mencerminkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan respon terhadap bencana.

#### **D. Kesimpulan**

Digital leadership memegang peran penting dalam pemerintahan, terutama dalam lembaga seperti BPBD Aceh Barat mengingat kondisi daerah ini merupakan salah satu tempat yang sering terjadi berbagai jenis bencana, pemimpin yang memiliki kompetensi digital leadership akan mampu mengelola, memanfaatkan, dan mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kompetensi ini membantu menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi, yang sangat penting dalam menjalankan misi BPBD dalam mitigasi dan respons bencana.

BPBD Aceh Barat mengadopsi teknologi digital seperti sensor sireneperingatan dini, seismometer, media social, dan sistem informasi SIMAMPU yang akan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, pelatihan rutin yang diadakan setiap tiga bulan bersama BNPB membantu meningkatkan kapabilitas staf BPBD dalam menggunakan teknologi. Kepala Pusdelob BPBD Aceh Barat juga menunjukkan kompetensi digital leadership yang baik, terbuka terhadap ide-ide baru, dan memiliki relasi luas yang memfasilitasi adopsi teknologi. Adapun usulan perbaikan yang dapat dilakukan di BPBD agar adopsi teknologi yang dilakukan

dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Terakhir untuk pelatihan SDM yang dapat melibatkan lebih banyak staf, sehingga seluruh tim dapat mengembangkan keterampilan digitalnya secara langsung dan merata.

### **Daftar Pustaka**

- Ananda Roro Wulandari, Afninda Ainun Arvi, Mohammad Irfandi Iqbal, Fatrining Tyas, Indra Kurniawan, & Mochammad Isa Anshori. (2023). Digital Hr : Digital Transformation In Increasing Productivity In The Work Environment. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(4), 29–42. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i4.2729>
- Aziz, M. H. (2024). Komunikasi Bencana Berbasis Digital. *Communicator Sphere*, 4(1), 57–73. <https://doi.org/10.55397/cps.v4i1.111>
- Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(1), 47. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780>
- Cahyono, M., Saputra, N. D., & Saputra, A. I. (2023). Transformasi Digital Pemerintahan : Perubahan Organisasi dan Budaya Pemerintahan Melalui Teknologi Digital. *Jurnal Teknologi Informasi Mura*, 15(2).
- Irawan, I., Azmi, Z., & Hutasuhut, M. (2024). Iot Pada Sistem Monitoring Kecepatan Air Sungai Babura Sebagai Peringatan Dini Banjir Berbasis Node Mcu. *Jurnal Sistem Komputer Triguna Dharma (JURSIK TGD)*, 3(3), 80–87. <https://doi.org/10.53513/jursik.v3i3.9289>
- Julianto, B., & Agnanditiya Carnarez, T. Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>
- Maritha, D. (2022). Karakteristik Digital Leadership di Era Digital Transformation. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(2).
- Melliasari, H., Dwiyono, I., & Restiani Widjaya, Y. (2024). *Digital Leadership Skill dan Peranannya Bagi Kepemimpinan Institusi Pelayanan Kesehatan di Era Digital*. *Journal Syntax Idea*.
- Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1). <https://doi.org/10.24076/jspg.2022v4i1.776>
- Sufyanah, B. (2023). Konsep Dasar Kepemimpinan Perubahan. *INTIZAM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Wesly, J., Kristiana, V., Bong, T., & Saputra, N. (2021). Pengaruh Digital Leadership, Total Quality Management, dan Knowledge Management Terhadap Sustainability Management Pada Perusahaan Di Dki Jakarta. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2(2), 97–124. <https://doi.org/10.35912/simo.v2i2.543>